

NEW MEDIA: ISLAM AGAINST GLOBAL PROPAGANDA (ANTITHESIS AGAINST ISLAMOPHOBIA IN SOUTHEAST ASIA)

¹ Salman Alfarisi, Mailin²

¹Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

²Dosen UIN Sumatera Utara

Abstract

Reporting of terrorist acts in Indonesia has always been a hot topic of discussion. When reporting on the action related to radical Islamic groups automatically appears a negative stigma against Islam. The negative stigma presents Islamophobia and becomes a topic of discussion on social media that affects social and political interpretations of society. All feel entitled to provide views, comments, feedback and attitudes and seek to influence each other. Some Islamic teachings or terminology are stigmatized as the cause of the birth of acts of terror. Among them, the debate over the terminology of "infidel", "jihad", "khilafah" which is essentially a terminology that is in the Qur'an and even part of Islamic teachings. The mass media also reported incidents of violence that were not related to radical Islamic groups in Indonesia. Even though the perpetrators are individuals or groups who are adherents of a religion or come from a certain race, it is still possible not to attach a negative stigma to the religion and race of the perpetrators. There is no stigma that terminology, teachings or culture are referred to as the cause of the birth of acts of violence as stigma against Islam. Indonesia is one of eleven countries in Southeast Asia. Unlike some other countries in Southeast Asia, Indonesia is a country with a majority Muslim population. Unlike Laos, Myanmar, Cambodia and Thailand, these countries are predominantly non-Muslim. The world is witnessing the unpeaceful attitude shown by the Thai government towards the Muslims of Pattani, Yala, Narathiwat and southern Songkhla. The world is also witnessing the plight of the Rohingya Muslim population in Myanmar. Although Cambodia to this day has provided good protection for the champ Muslim community, the Khmer Rouge's bad behavior towards them was heartbreaking. The conflict that has occurred has given rise to discriminatory attitudes and even genocide against Muslim minorities. Whatever the reason, this also cannot be separated from the negative stigma against Muslims in these countries with Muslim minorities.

Keywords: New Media, Islam, Global Propaganda, Antithesis, Islamophobia

PENDAHULUAN

Sebenarnya Islamophobia merupakan studi kasus teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Teori konstruktivisme adalah teori yang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di masyarakat pada hari ini tidak terbentuk

dengan sendirinya melainkan terjadi atau muncul sebagai akibat dari konstruksi atau ciptaan oleh manusia dalam jangka waktu yang lama.

Islamofobia sendiri adalah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka, diskriminasi, ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Istilah ini sudah ada sejak tahun 1980-an, tetapi menjadi lebih populer setelah peristiwa serangan 11 September 2001.

Teori tentang propaganda juga mewarnai pembahasan isu-isu kontemporer terutama hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan media digital dan islamophobia itu sendiri. Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa propaganda berasal dari bahasa Latin modern '*propagare*' yang berarti mengembangkan atau memekarkan. Arti propaganda tersebut kemudian dimaknai secara kontekstual sebagai rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Konsep propaganda diajukan oleh psikolog Harold Lasswell pada tahun 1920, yang menyatakan propaganda merupakan pengaturan dari perilaku kolektif dengan melakukan manipulasi pada simbol-simbol yang signifikan. Penggunaan istilah "perilaku kolektif" adalah upaya untuk melakukan pemotretan terhadap opini publik, sebuah tata nilai bersama tanpa melihat adanya kedekatan secara fisik. Dari pendefinisian yang dilakukan oleh para ahli di atas bisa diambil beberapa kata kunci dalam memahami propaganda yaitu menyebarluaskan pesan, memengaruhi pendapat, tujuan, dan sesuatu yang telah direncanakan. Pada aspek lain, dalam perspektif Sosiologi pula, fenomena Islamophobia tidak terlepas dari konflik. Sehingga untuk melihat potret riil terhadap fenomena Islamophobia dapat ditinjau dari teori konflik. Begitu juga halnya propaganda tidak terlepas dari teori konflik, sehingga masing-masing pihak melakukannya untuk memengaruhi publik.

Aktivitas propaganda dilakukan bisa karena berbagai macam tujuan. Laswell (1927) membahas empat tujuan utama propaganda, yaitu;

1. Untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh.
2. Untuk melestarikan persahabatan sekutu.
3. Untuk mempertahankan persahabatan dan, jika mungkin, untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang netral.
4. Untuk menghancurkan semangat musuh.

Tentunya apa yang disampaikan Laswell ini sesuai dengan suasana peperangan yang sedang terjadi pada zamannya.

Goebbels juga mengatakan:

“Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya.”

Tentang kebohongan ini, Goebbels juga mengajarkan bahwa kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang diubah sedikit saja. Propaganda telah berkembang dalam perang psikologis di mana propaganda menemukan ekstensinya. Propaganda politik yaitu melibatkan usaha pemerintah, partai atau golongan untuk pencapaian tujuan strategis dan taktis.

Namun apa bila dilihat dari aspek media, Dewan Pers Indonesia telah menetapkan landasan moral dan etika jurnalistik. Landasan dan etika yang dimuat dalam pasal-pasal yang ada menampilkan nilai-nilai luhur tujuan pemberitaan itu sendiri; Independensi, anti suap, akurasi berita, tanpa diskriminasi dan harus berimbang. Jika dicermati dari kode etik jurnalistik yang ditetapkan ini, harusnya propaganda tidak bisa memaksakan konten pemberitaan yang melanggar kode etik. Kemudian, apa bila disandingkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kode etik jurnalistik dan pandangan Harold Lasswell dan Goebbels terkait konsep propaganda bohong dan manipulatif, harusnya jurnalistik sangat memperhatikan dampak pemberitaan secara mendalam. Media tidak boleh diambil alih oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sektarianisme politik dan bisnis yang jauh dari nilai-nilai luhur jurnalistik itu sendiri.

Penting kiranya mendalami hubungan isu-isu kontemporer, islamophobia dan perkembangan media baru. Media baru merupakan sebuah terminologi media yang dikenal lantaran keterkaitannya dengan kemajuan teknologi digital. Sejak dunia mengenal internet, media mengalami jangkauan interaksi antar manusia yang lebih luas bahkan tanpa batas. Aplikasi-aplikasi media sosial semakin beragam dan memiliki kekhasan masing-masing. Semua bisa melakukan penjelajahan informasi yang diinginkan dan mengungkapkan perasaan, ide, gagasan dan komentar terkait apapun di ruang publik dunia maya tanpa batas. Media baru, jelas menjadi tantangan tersendiri adakah ia sebagai solusi atau malah menjadi masalah bagi ancaman islamophobia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan pandangan subjektif kritis dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan sedikit studi Pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data teks media yang telah dikonstruksikan oleh jurnalis. Data sekunder bersumber dari referensi atau literatur yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Menurut penulis, islamophobia merupakan sebuah istilah aneh. Kita tidak dapatkan istilah christophobia, budhaphobia, hinduphobia dan lain sebagainya, membuktikan bahwa islamophobia merupakan sebuah istilah yang sangat erat kaitannya dengan propaganda. Jika ada istilah anti Amerika, misalkan, harusnya terhadap Islam juga istilah yang digunakan adalah anti Islam. Jika beberapa negara melakukan kekerasan terhadap warga sipil dengan dalih menjaga stabilitas negara, meski tidak bisa dibenarkan, para pelaku aksi teror juga memungkinkan punya dalih untuk membenarkan tindakannya. Berdasarkan ini, dunia Islam dihadapkan kepada propaganda-propaganda besar yang lahir dari rahim teroris sekaligus dari pihak-pihak yang memerangi teroris Islam, kemudian muncul sebuah istilah yang bernama islamophobia.

Rangkaian serangan kelompok militan Islam al-Qaeda pada 11 September 2001 menghasilkan propaganda global yaitu kesepakatan internasional melawan teroris Islam. Tidak terkecuali Indonesia, meskipun merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim, kampanye melawan teroris terus digencarkan. Penanggulangan terhadap beragam rangkaian peristiwa tindak kekerasan kelompok Islam radikal oleh aparat penegak hukum di Indonesia relatif lebih fokus dan terarah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya terutama di negara minoritas Islam seperti Myanmar dan Thailand. Sebagai penguat data, Jika dilakukan *googling* kata ‘pembantaian’ maka kita akan menemukan urutan penyajian: pembantaian pki, pembantaian santa cruz, pembantaian suku aborigin, pembantaian Rohingya, pembantaian poso, dan seterusnya. Diantara yang disajikan adalah tindak kekerasan yang terjadi di Asia Tenggara seperti PKI, Santa Cruz, Rohingya dan Poso. Kemudian apabila kita klik ‘pembantaian rohingya’, maka akan muncul berita-berita kekejaman dengan Bahasa yang vulgar, seperti berita yang berjudul:” Pembantaian Rohingya, Myanmar bunuh Semua Anak dan Orang Dewasa”.

Penelusuran ini membuktikan bahwa islamophobia di Myanmar sampai kepada tahapan pembantaian. Ketika dikonfirmasi, pemerintah Myanmar berdalih lantaran rakyat Rohingya bukan etnik negara Myanmar bersamaan dengan tuduhan ekstrimis. Jenderal Min Aung Hlaing Panglima Tentara Myanmar mengatakan kaum Rohingya "tak pernah menjadi kelompok etnik" dan ia menuduh Rohingya sebagai "ekstremis" yang berupaya untuk menguasai negara bagian Rakhine.

Tidak dapat dipungkiri, propaganda global terkait islamophobia juga ada di Indonesia. Tindak kekerasan teroris kelompok Islam radikal kerap terjadi bermusim. Jika dilihat dari pemberitaan media, peristiwa kekerasan itu terkadang hilang seolah tidak akan pernah terjadi, kemudian pada saat berikutnya jika terjadi seolah tidak akan pernah hilang. Kekerasan yang terjadi memunculkan stigma-stigma negatif terhadap Islam dan umat Islam, terutama oleh kalangan sebagian penduduk yang bukan beragama Islam. Sebuah berita yang terdapat dalam laman CNN Indonesia berjudul: “BNPT Sebut Terorisme Adu Domba Islam Berujung Islamophobia”, Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nurwahid menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi lantaran gerakan radikalisme atau terorisme ini seringkali memanipulasi agama dengan mengedepankan dan menonjolkan identitas keagamaan tanpa diikuti ajaran-ajaran yang benar. Katanya: "Sehingga menjadikan fitnah bagi Islam, karena mengadu domba Islam, membuat islamphobia," kata Nurwahid dalam sebuah diskusi.

Terorisme yang mengatasnamakan Islam dianggap mengadu domba Islam dan membuat islamophobia. Hal ini lantaran pelakunya menggunakan simbol-simbol agama, ditambah lagi pernyataan beberapa pejabat yang semakin menekankan bahwa simbol-simbol itu benar-benar melekat pada teroris. Fachrul Razi Menteri Agama RI ketika itu, dalam judul berita: “Penjelasan dan Kontroversi Agen Radikalisme *Good Looking*” di situs Detik News, mengatakan: "Cara masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang *good looking*, penguasaan

bahasa Arab bagus, hafiz, mulai masuk, ikut-ikutan jadi imam, lama-lama orang-orang di situ bersimpati, diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan," ucapnya.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh KH. Imam Jazuli, Lc., M.A dijelaskan bahwa kebijakan pemberantasan radikalisme menjadi perbincangan hit belakangan ini. Bukan karena program tersebut memang mendesak, tetapi ketidakjelasan definisi dari pemerintah merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga menjurus pada praktik Islamophobia. Padahal, radikalisme ada pada setiap agama dan dilakukan oleh oknum yang merusak citra positif agama.

Dua hal ini, yaitu simbol-simbol Islam yang digunakan pelaku tindak terorisme ditambah melekatkan simbol-simbol agama pada teroris oleh pejabat pemerintahan, memunculkan stigma bahwa kekerasan tersebut identik dengan Islam. Maka, Direktur Perlindungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Herwan Chaidir berupaya agar penanggulangan terorisme tidak menimbulkan masalah islamophobia, beliau menyampaikan: "Untuk melihat yang bersangkutan itu terafiliasi kelompok teror atau tidak, bukan dari tampilan fisik, berjanggut, celana cingkrang, keningnya hitam," katanya kepada wartawan, Senin (14/10/2019). Dijelaskannya, stereotip bahwa yang bercelana cingkrang adalah teroris dan yang berdahi hitam adalah radikal itu salah. Yang benar, masyarakat perlu melihat sikap dari kelompok atau individu itu. Namun penjelasan Herwan tetap saja belum bisa terhindar dari kata "*kafir*" dan "*khilafah*" sebuah terminologi yang ada dalam al-Quran, dia mengatakan: "Lebih pada paham yang diimplementasikan, yakni berupa sikap dan tutur kata yang keras, intoleransi, anti kepada Pancasila, anti kepada NKRI, dan mudah meng*kafirkan* pihak lain serta berkeinginan mendirikan *khilafah*," kata Herwan.

Selama ini terminologi "*kafir*" bukan masalah dalam penyampaian ajaran agama Islam di ruang-ruang publik. Namun, setelah ciri-ciri teroris terkait dan dikaitkan dengan terminologi ini justru menimbulkan interpretasi yang identik dengan ujaran kebencian. Guntur melalui akun Twitter pribadinya @GunRomli mengatakan : "*Kafir* memang terminologi Quran, tapi menyebut orang *kafir* (*takfiri*) mengafirkan ini masuk ujaran kebencian, kita perlu lawan pengkafiran di ruang publik. Perlu ada aturan untuk ini," kicau Guntur seperti dikutip Suara.com, Rabu (6/3/2019).

Ketika terminologi "*kafir*" dianggap ancaman lantaran terkait dan dikaitkan dengan terorisme, PBNU memandang perlu meluruskan penggunaan dan pemahaman terminologi dimaksud pada Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat yang diadakan pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2019. Berikut klarifikasi dan penjelasan salah seorang Perumus *Bahtsul Masail Maudluyah* Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, KH Afifuddin Muhajir Situbondo melalui sebuah video berdurasi 3 menit 40 detik: "Harus dibedakan pula antara keyakinan dan pernyataan, apa yang boleh atau bahkan wajib menjadi

keyakinan belum tentu bisa dinyatakan. Misalnya, suatu kelompok yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dinyatakan *kafir*, kita wajib meyakini mereka *kafir*. Akan tetapi mengatakan, "kamu *kafir*", "dia *kafir*", "mereka *kafir*", itu bisa menciptakan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat plural, yang sudah damai dan sudah diusahakan dan diciptakan dengan susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita. Oleh karena itu, perlu dicari kalimat lain yang lebih santun, misalnya non-Muslim. Ini tanpa harus mengubah "*Qul yaa ayyuhal kaafirun*" menjadi "*Qul yaa ayyuhal non-Muslim*". Itu tidak boleh". Berbeda, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD justru menilai penghapusan kata *kafir* tidak perlu menjadi perdebatan panjang. Pasalnya, kata *kafir* tidak pernah masuk dalam peraturan perundangan di Indonesia: "Pelarangan sebutan *kafir* bagi nonmuslim tak perlu diributkan. Ia tak perlu difatwakan karena di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan memang tidak ada sama sekali kata *kafir*. Ia tak perlu diributkan karena dalam dalil *naqly* agama Islam memang ada istilah itu. Meributkannya tak produktif," pungkas Mahfud.

Demikian pula hal yang sama terkait terminologi "*jihad*" dan "*khilafah*" membentuk stigma tersendiri lantaran dua istilah itu juga merupakan terminologi yang ada dalam al-Quran. Judul berita yang menyebutkan kata "*jihad*" terlebih terhadap personal yang masih diduga kelompok teroris juga cukup meresahkan, sebagaimana berita berjudul: "Senpi Dan Buku *Jihad* Diamankan Dari Terduga Teroris" pada situs CNN Indonesia. Tito Karnavian saat itu sebagai Kapolri mengungkapkan dampak ideologi *khilafah islamiyah* jika diterapkan di Indonesia. Menurutnya, ideologi tersebut bakal menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Indonesia (NKRI): "Ideologi *khilafah* menjadi ancaman bagi NKRI karena tidak paralel dengan konsep Pancasila," kata dia di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Terlepas dari efektifitas ungkapan-ungkapan dimaksud dalam penanggulangan isu terorisme di Indonesia, stigma negatif terhadap Islam dan sebagian dari ajarannya telah terbentuk, sekurang-kurangnya menimbulkan perdebatan. Tidak terbendung, persepsi tentang terorisme menyasar kelompok-kelompok Islam di antaranya kelompok yang disebut-sebut dengan 'wahabi' dan 'salafi'. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwahid mencatat bahwa kebanyakan tersangka teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri dan BNPT merupakan pemeluk Islam dengan latar belakang mazhab Wahabi dan Salafi yang jihadis. "Mereka semua, mohon maaf dengan segala hormat, mereka bermahzab salafi wahabi. Yang kita tangkap ini salafi wahabi jihadis, yang jadi kombatan,". Meski begitu, Ahmad menegaskan tak semua pemeluk Wahabi dan Salafi memiliki ideologi sebagai teroris. Ia menyatakan masih banyak pemeluk Wahabi dan Salafi yang menjalankan perintah agama sesuai ketentuan yang berlaku dan tak menyimpang. Menanggapi pernyataan ini, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan bahwa tersangka terorisme tidak berkaitan dengan mazhab keagamaan tertentu. Hal itu

disampaikan sebagai respon atas catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mendapati kebanyakan tersangka teroris merupakan pemeluk Islam dengan latar belakang mazhab Wahabi dan Salafi. Tentunya Indonesia harus hati-hati menggunakan ungkapan bahwa teroris erat kaitannya dengan Wahabi dan Salafi, mengingat mazhab Wahabi juga sebagai cikal bakal berdirinya sebuah kerajaan berdaulat yang bernama Saudi Arabia dan memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Stigma tentang buruknya politik agama atau yang diistilahkan dengan politik identitas, mewarnai perpolitikan Indonesia. Stigma ini muncul lantaran tipisnya perbedaan kata politik dan politisasi sehingga telah terjadi kerancuan pemahaman. Politisasi dianggap politik sebaliknya pula politik dianggap politisasi. Maksudnya, politik harus memperjuangkan nilai-nilai luhur kebudayaan, ras dan golongan termasuk agama dengan cara yang konstitusional, ini yang dinamakan politik identitas. Perjuangan politik terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam agama merupakan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai luhur agama tidak perlu dibenturkan dengan semangat Pancasila, UUD RI, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Adapun politisasi identitas adalah membawa budaya, ras dan golongan termasuk agama ke dalam ruang pragmatisme politik. Simbol-simbol agama digunakan sebatas tujuan pencitraan untuk meraih simpatik politik selebihnya tidak ada nilai-nilai luhur yang diperjuangkan. Ini yang dimaksud politisasi identitas termasuk agama. Adapun agama sebagai basis pandangan dan perjuangan politik jelas tidak bertentangan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru membenturkan agama dengan Pancasila merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa. Lukman Hakim selaku Menteri Agama pada kegiatan Lokakarya Pengarusutamaan Moderisasi Agama pada tanggal 25-27 juli 2018 menyampaikan perlunya meluruskan pemahaman tentang perbedaan politik agama dan politisasi agama: "ini sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Karena ada sebagian masyarakat yang menyebutkan jangan bawa-bawa agama dalam politik atau ada ungkapan agama harus ada di politik". Beliau menyampaikan bahwa politisasi agama adalah menjadikan agama sebagai media, sarana, instrumen untuk mencapai tujuan pragmatisme. Sedangkan politik agama adalah menjadikan agama sebagai pijakan utama dalam berpolitik. Bahkan menjadi ruh, jiwa, spirit dan landasan dalam aktifitas politik. Bahkan seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid atau biasa disapa Gus Solah menjelaskan bahwa Politisasi agama boleh dilakukan selama untuk kepentingan dan kebaikan bangsa, "Tetapi kalau politisasi agama ini untuk kepentingan perorangan, kelompok, dan partai politik, itu yang tidak diperbolehkan," kata Gus Solah di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (31/3/2018).

Pemanfaatan media baru dalam menekan ancaman islamophobia adalah sangat penting. Situs dan aplikasi media elektronik dan media sosial memiliki daya

jangkau yang cepat, bebas dan luas. Dibandingkan media tradisional, media baru sebagai sarana menekan laju eksistensi islamophobia terutama di Indonesia.

Tabel 1: Karakteristik Media Konvensional vs Media Baru

No.	Karakter	Media Konvensional	Media Baru
1	Isi	Cenderung terbatas, adanya sensor, pembatasan oleh space, unsur lokalitas	Tidak terbatas, transparan, prinsip global, bebas, publikasi isi cepat
2	Orientasi fungsi	Kelas elit, mengabaikan universalitas publikasi	Semua kalangan, akses universal
3	Institusi	dikendalikan oleh pemilik, adanya konsentrasi kepemilikan, membutuhkan modal besar	Terdesentralisasi, fleksibel, anonimitas, pengguna sebagai pemilik, hanya untuk modal akses
4	Akses public	Rendah, satu arah.	Sangat luas, multi arah, interaktif, kebebasan, kesetaraan (equality)

Dalam situs berita Detikinet diberitakan dengan sebuah judul: “Kominfo Blokir 3.640 Ujaran Kebencian, Termasuk Jozeph Paul Zhang”. ada tiga kriteria konten yang mengalami pemblokiran. Pertama, konten tersebut memuat penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. Kedua, ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu: "Dan yang ketiga, seruan untuk membenci individu dari kelompok atau suku tertentu. Konten-konten yang telah di-takedown tersebut tersebar di berbagai situs platform media sosial, serta platform file sharing atau berbagai konten," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi.

Peran masyarakat, ormas, kelompok masyarakat dan pemerintahan di semua lini harus menyadari bahayanya islamophobia di Indonesia dengan memanfaatkan media baru semaksimal mungkin. Melawan islamophobia pada hakikatnya adalah melawan propaganda global. Melawan islamophobia juga pada hakikatnya melawan stigma-stigma negatif yang muncul dari peristiwa-peristiwa penyebab timbulnya islamophobia itu sendiri. Perlu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya agar islamophobia tidak semakin berkembang. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Memberikan informasi yang jelas tentang Islam dan hubungannya dengan kelompok lain.
2. Menggencarkan penelitian oleh ilmuwan muslim yang dapat memberikan informasi pengelolaan aturan kepada pemerintah.

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam dengan berbagai media serta memotivasi penggiat media sosial sadar bahaya islamophobia dalam interaksi melalui konten, komentar dan tanggapan.
4. Mempermudah akses mempelajari Islam.
5. Menularkan pengalaman dan pemahaman yang “menyenangkan” tentang Islam.
6. Tidak melekatkan simbol, ajaran dan teminologi Islam pada pelaku kejahatan dan tindak kekerasan.
7. Meluruskan makna jihad dalam konteks teknologi informasi, politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.
8. Ormas Islam dan Pemerintah bekerjasama dalam banyak hal, sebagai mitra bukan sebagai lawan.

KESIMPULAN

Teori konstruktivisme menguatkan bahwa islamophobia dilatarbelakangi konflik yang sudah terjadi sejak lama. Islamophobia bagian dari propaganda global, baik hal itu bertujuan ideologi, politik maupun ekonomi. Tindak kekerasan kelompok radikal Islam dan upaya penanggulangannya sedikit banyak menumbuhkan bibit islamophobia termasuk di Indonesia. Apakah itu terkait dengan propaganda global atau tidak, sekurang-kurangnya telah terjadi perdebatan-perdebatan pada simbol-simbol, ajaran dan teminologi Islam tertentu yang dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan. Stigma negatif terhadap Islam yang lahir dari penyimpangan pengamalan ajaran Islam sebagai penyebab tumbuhnya islamophobia. Melekatkan simbol, ajaran dan terminologi Islam kepada kejahatan dan tindak kekerasan, membenturkan ajaran Islam dengan ideologi negara juga menjadi penyebab munculnya islamophobia.

Melawan islamophobia pada hakikatnya melawan propaganda global. Melawan stigma negatif terhadap Islam pada hakikatnya melawan islamophobia. Melawan stigma negatif terhadap Islam merupakan semangat kebangsaan dan menjadi tanggungjawab bersama. Menampilkan ajaran Islam yang *washatiyyah* (moderat) *rahmatan lil alamin* merupakan jawaban yang paling efektif menyingkirkan islamophobia. Pemanfaatan media baru secara massif dan terukur sangat penting dalam rangka mencegah hadirnya islamophobia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Anugrahadi, <https://www.liputan6.com/news/read/3592444/kapolri-nkri-terancam-pecah-jika-ideologi-khilafah-diterapkan>.
- Agus Triyanto, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5547696/kominfo-blokir-3640-ujaran-kebencian-termasuk-jozeph-paul-zhang>.
- Andi Youna Bachtiar dkk, “Peran Media Dalam Propaganda” Jurnal Komunikologi Vol.13 No. 2, 2016.

- (<https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/viewFile/165/165>).
- Asrinda & Aidil, "Wacana Islamophobia Di Media Massa" Jurnal Ilmiah Fak. Ilmu Komunikasi Univ. Riau Vol. 7 No. 1, 2019. (<https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/download/3784/1988>).
- Casciani, Dominic. "Islamophobia pervades UK - report", BBC News, June 2 2004.
- CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210330222854-20-624129/bnpt-sebut-terorisme-adu-domba-islam-berujung-islamofobia>.
- Danu Damarjati, <https://news.detik.com/berita/d-4745953/kelompok-teroris-ada-banyak-bnpt-sebutkan-ciri-cirinya>.
- Dewan Pers Indonesia, Kode Etik Jurnalistik. <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>.
- Edward Kessler, Neil Wenborn, A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge University Press, ISBN 0-521-82692-6.
- Epa, <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/internasional/2017/09/18/panglima-tentara-myanmar-jelaskan-alasan-usir-muslim-rohingya>.
- Fathoni, <https://www.nu.or.id/post/read/103272/penjelasan-perumus-bahtsul-masail-munas-nu-soal-polemik-kafir>.
- Gondo, <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/497263/Bedakan-Antara-Politik-Agama-dan-Politisasi-Agama>.
- Historian Victor Davis Hanson, in the The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) By Robert Spencer, ISBN 0-89526-013-1, Regnery Publishing.
- Ibnu Zulian, Analisis Pengaruh Islamophobia Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Syarikat Di Pemerintahan Donald Trump, Jurnal PIR Vol.3 No. 2, 2019, (<http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/download/596/818>).
- Imam Jazuli, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2019/12/03/mewaspadai-islamophobia-pemerintah>.
- Maya Saputri, <https://tirto.id/gus-sholah-beri-contoh-politisasi-agama-yang-diperbolehkan-cG1A>.
- Pebriansyah Ariefana dan Chyntia Sami, <https://www.suara.com/news/2019/03/06/172424/guntur-romli-sebut-orang-kafir-masuk-ujaran-kebencian>.
- Pebriansyah Ariefana dan Chyntia Sami, <https://www.suara.com/news/2019/03/07/073000/pro-kontra-penghapusan-panggilan-kafir-untuk-non-muslim?page=all>.
- Quraishi, Muzammil, Muslims and Crime: A Comparative Study, Ashgate Publishing Ltd., 2005.

- Salvatore Simarmata, Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia, *Interact* 2014:Vol. 3, No. 2.
(<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=547996&val=7530&title=Media%20Baru%20Ruang%20Publik%20Baru%20dan%20Transformasi%20Komunikasi%20Politik%20di%20Indonesia>.)
- Sefti Oktarianisa, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200910132248-4-185828/pembantaian-rohingya-myanmar-bunuh-semua-anak-orang-dewasa>.
- Tim CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428073407-12-635708/bnpt-ungkap-banyak-teroris-bermazhab-wahabi-dan-salafi>.
- Tim CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429104259-20-636324/respons-bnpt-anwar-abbas-tegaskan-terorisme-tak-bermazhab>.
- Tim DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-5162351/penjelasan-dan-kontroversi-agen-radikalisme-good-looking>.